

**PENGARUH PERENCANAAN DAN KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
(Studi Kasus Di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung)**

Atik Rochaeni, Bambang Somantri

Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung

Jl Casa No. 2, Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung

e-mail: [neptura76@gmail.com](mailto:neptura76@gmail.com) / [bsomantri81@yahoo.com](mailto:bsomantri81@yahoo.com)

**Abstrak**

*Penelitian ini difokuskan pada perencanaan dan koordinasi sebagai determinan dalam mencapai efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung yang dirasakan masih belum optimal.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, Populasinya adalah pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung. Ukuran populasi dalam penelitian ini adalah 101 teknik penarikan sampel menggunakan teknik Sample Random Sampling, dengan ukuran sampel sebanyak 81 orang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, observasi, wawancara serta penyebaran angket.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable perencanaan dan koordinasi baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung.*

*Secara simultan variable perencanaan dan koordinasi memiliki pengaruh sebesar 67,00%, sedangkan secara parsial variabel perencanaan memiliki pengaruh sebesar 56,40% sedangkan variabel koordinasi memiliki pengaruh sebesar 43,70% terhadap efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung.*

*Rekomendasi yang disampaikan adalah agar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung efektif, hendaknya dirumuskan berbagai alternatif program dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan dan koordinasi yang dilakukan bukan hanya pada penyusunan program tetapi*

*juga perlu dilakukan internalisasi program yang telah ditetapkan kepada para pemangku kepentingan.*

*Kata Kunci : Perencanaan, Koordinasi, Efektivitas*

## **1. PENDAHULUAN**

Efektivitas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting, karena Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola dan mengorganisasikan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan visi daerahnya dan menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Ini merupakan implikasi dari diterapkannya otonomi yang ditumpukan kepada kabupaten/kota sejak tahun 2004. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah memberikan dasar hukum dan acuan bagi daerah untuk mengelola sumber daya tersebut melalui perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga telah memberikan batasan kewenangan kabupaten/kota dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tahapan perencanaan menjadi salah satu proses yang penting, karena hasil

pembangunan yang baik senantiasa didahului oleh perencanaan yang baik pula.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Keberhasilan penerapan program pembangunan, salah satunya sangat ditentukan oleh suatu perencanaan yang mampu menjawab permasalahan dan mengantisipasi peluang serta tantangan yang muncul secara cermat, dan dalam prosesnya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk masyarakat dan aparat dari

tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang tertinggi.

Dalam implementasinya, efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung, berdasarkan pengamatan awal penulis belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi, diantaranya :

- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun belum mampu mengakomodasi seluruh program yang diusulkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung. Contoh : Beberapa program yang diajukan oleh SKPD tidak termasuk ke dalam program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berjalan, dikarenakan skala prioritas.
- b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun belum mampu sepenuhnya merespon keluhan pemangku kepentingan. Contoh Begitu banyaknya perbaikan infrastruktur jalan di bawah kewenangan kabupaten Bandung belum termasuk ke dalam RKPD tahun berjalan karena keterbatasan alokasi dana.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun belum mampu menyesuaikan dengan perubahan eksternal. Contohnya : Dokumen RKPD

belum mampu menyesuaikan dengan keinginan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, berdasarkan penulis menduga bahwa belum efektifnya Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah (RKPD) di BAPPEDA Kabupaten Bandung, disebabkan oleh perencanaan yang belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang dibuat belum berbasis data kebutuhan organisasi, yang dijadikan acuan dalam penyusunan penyusunan program pembangunan. Contoh : Data organisasi yang dijadikan sebagai acuan tidak lengkap diisi, sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- b. Penyusunan Perencanaan belum sepenuhnya dilakukan dari Pengembangan berbagai alternatif kegiatan. Contoh : Evaluasi terhadap hasil kegiatan yang dilakukan, tidak dilaporkan secara berkala ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, sehingga kesulitan dalam mengembangkan alternatif kegiatan.
- c. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), belum sepenuhnya didasarkan atas identifikasi berbagai kemudahan dan hambatan eksternal organisasi. Contoh : Analisis yang dilakukan belum berdasarkan metode yang baku, misalnya analisis SWOT.

Selain disebabkan oleh belum maksimalnya perencanaan, belum

efektifnya menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung, juga diakibatkan oleh belum maksimalnya koordinasi yang dilaku-kan, hal ini terlihat dari indikasi sebagai berikut :

- a. Komunikasi informasi dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD lain kurang dilakukan, koordinasi cenderung dilakukan secara formal saja. Contoh : Dalam menghimpun berbagai data sebagai bahan penyusunan program selalu menggunakan surat secara formal.
- b. Disiplin terhadap waktu yang telah ditentukan masih kurang. Contoh : Dalam hal penyampaian rencana kerja setiap SKPD tidak mentaati waktu yang telah ditentukan.
- c. Masih terdapat rencana kerja yang diajukan belum sesuai dengan visi dan misi kabupaten Bandung yang telah ditentukan.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Seberapa besar pengaruh perencanaan terhadap efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.

- b. Seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penyusunan Program Pembangunan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.
- c. Seberapa besar pengaruh perencanaan dan koordinasi berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas penyusunan Program Pembangunan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa perencanaan dalam pencapaian efektivitas penyusunan program pembangunan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa koordinasi dalam pencapaian efektivitas penyusunan program pembangunan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa perencanaan, koordinasi secara simultan dalam pencapaian efektivitas penyusunan program pembangunan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan (*planning*) merupakan fungsi pertama dalam manajemen yang bersifat fundamental, bahkan perencanaan dijadikan sebagai dasar dan titik tolak bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuannya, apapun kegiatannya dan tanpa melihat apakah organisasi yang bersangkutan besar atau kecil” Perencanaan dalam suatu organisasi sangatlah diperlukan, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan penting dibandingkan fungsi-fungsi lainnya. Perencanaan pada hakekatnya dapat menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Salam (2004:14), “Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.

Terry dalam Hasibuan (2006:92) mengatakan :

*“Planning is the selecting and relating of fact and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activitaions believes necessary to achieve desired result”* (Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan)”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, menunjukkan bahwa perencanaan merupakan suatu pengambilan keputusan untuk waktu yang akan datang, dilakukan dengan cara merumuskan dan memutuskan tujuan yang akan dicapai. Agar pelaksanaan perencanaan dapat menghasilkan rencana yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan organisasi, maka diperlukan adanya langkah-langkah perencanaan sebagai pendukung dalam pelaksanaan kerja.

### 2. Pengertian Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan

para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Sedangkan menurut Terry dalam Handyaningrat (2002:75), “Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”. Lebih lanjut Terry menyatakan, koordinasi menurut meliputi :

- “1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. *Directing* atau penentuan arah usaha-usaha tersebut”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

### **3. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau

sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson dalam Handyaningrat (2002:16) yang menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut pendapat Drucker dalam Moenir dalam bukunya mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

*“Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”*. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan)

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Efektivitas

merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output), yang meliputi sumber daya personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

### 3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional yaitu untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Nursalam (2003:84), mengatakan bahwa :

”Hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain dan dengan demikian dalam rancangan korelasional peneliti melibatkan paling tidak dua variabel. Jika variabel yang diteliti ada dua, maka masing-masing merupakan variabel bebas dan variabel terikat. Bila variabel yang diteliti lebih dari dua, maka dua atau lebih variabel sebagai variabel bebas atau prediktor dan satu variabel sebagai variabel terikat atau kriterium”.

Sedangkan jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*Explanatory Research*) dengan pendekatan kuantitatif. Tujuannya adalah menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini Perencanaan dan Koordinasi sebagai variabel bebas (X1 dan X2) yang berpengaruh terhadap Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung sebagai variabel terkait (Y). Menurut Soehartono (1995:33) metode eksplanatoris adalah : “Suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dengan bias yang kecil dan meningkatkan kepercayaan”.

Peneliti tidak memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap subyek penelitian, sehingga penelitian ini termasuk penelitian *ex-post facto*. Data diperoleh berdasarkan kejadian atau pengalaman yang telah berlangsung dengan baik mengenai Perencanaan dan Koordinasi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Transformasi Data

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk melakukan analisis regresi berganda maka data yang diamati minimal memiliki skala interval. Oleh karena itu data hasil pengamatan yang diperoleh dengan skala pengukuran ordinal, perlu di transformasi ke skala

pengukuran interval melalui *method of successive interval*, yang pada hakekatnya adalah suatu prosedur untuk menempatkan setiap objek ke dalam interval.

## 2. Pengukuran Hubungan Perencanaan dan Koordinasi terhadap Efektivitas.

Pengukuran hubungan atau korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dilakukan melalui uji korelasi dengan bantuan program SPSS, diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada tabel IV.20 di bawah ini :

TABEL IV.20

KORELASI VARIABEL PERENCANAAN, KOORDINASI DAN EFEKTIVITAS

### Correlations

	Perencanaan	Koordinasi	Efektivitas
Perencanaan	1	.819**	.922**
Koordinasi	.819**	1	.899**
Efektivitas	.922**	.899**	1
<i>Pearson Correlation</i>			
<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.000	.000
<i>N</i>	81	81	81

	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	
	<i>N</i>	81	81
Kinerja	<i>Pearson Correlation</i>	.922**	.899**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.000
	<i>N</i>	81	81

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan Data, September 2016

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 17, didapat koefisien korelasi variabel Perencanaan, Koordinasi terhadap variabel Efektivitas, sebagai berikut :

- Hubungan antara variabel Perencanaan dan variabel Koordinasi adalah  $r = 0,819$ . dengan tingkat signifikansinya  $0,000$  lebih kecil dari  $0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Perencanaan dan Koordinasi karena nilai  $r$  korelasinya  $> 0$ , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semakin besar nilai Perencanaan dan Koordinasi maka semakin besar dengan nilai Efektivitas.
- Hubungan korelasi antara Perencanaan dengan Efektivitas adalah  $r = 0,922$ . dengan tingkat

signifikansinya 0.000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Perencanaan dengan Efektivitas karena nilai  $r$  korelasinya  $> 0$ , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semakin besar nilai Perencanaan maka semakin besar dengan Efektivitas.

- c. Koefisien korelasi antara Koordinasi dengan Efektivitas adalah  $r = 0,899$ . dengan tingkat significansinya 0.000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Koordinasi dengan Efektivitas karena nilai  $r$  korelasinya  $> 0$ , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semakin besar nilai Koordinasi maka semakin besar Efektivitas.

### 3. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan dari deskripsi dan uji hipotesis yang telah dilakukan mengenai perencanaan dan koordinasi sebagai determinan dalam mencapai efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung ditemukan beberapa fakta menyangkut perencanaan dan koordinasi dan yang menyebabkan efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) belum maksimal, diantaranya :

1. Dalam menyusun perencanaan khususnya dalam mengembangkan rencana, Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung belum secara maksimal melakukan penilaian berbagai alternatif pilihan program dan dalam menetapkan kegiatan atau program dengan maksimal. Seharusnya sebelum menentukan program tersebut dilakukan evaluasi dan analisis secara mendalam tentang berbagai kemungkinan atau alternatif program yang akan diajukan kepada pimpinan. Misalnya untuk menanggulangi kemiskinan, menyampaikan beberapa alternatif program dengan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan yang sudah ada atau dengan memberikan bantuan finansial secara langsung untuk modal usaha.

2. Dalam melakukan koordinasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung belum secara maksimal berdasarkan pada prinsip akuntabilitas dan hubungan tanggung jawab. Prinsip akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Dalam hal ini

program-program yang telah ditetapkan kurang disampaikan atau diinternalisasikan kepada para pemangku kepentingan, sehingga para pemangku kepentingan tidak mengetahui hasil akhir dari program yang ditetapkan.

3. Dalam hal efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, (RKPD) Kabupaten Bandung belum sepenuhnya berorientasi kepada program-program jangka panjang dan bersifat strategis.

Belum efisiennya penggunaan pegawai dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, terlalu banyak sumber daya manusia atau pegawai yang dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sehingga menjadi kurang efisien.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan Koordinasi memiliki hubungan yang kuat dalam memengaruhi efektivitas penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung. Hubungan antara Perencanaan sebagai determinan dalam mencapai efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung, menunjukkan hubungan yang linier positif. Hal ini mengandung arti bahwa kenaikan nilai Perencanaan akan diikuti oleh naiknya nilai efektivitas penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung.

- b. Perencanaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung, menunjukkan hubungan yang linier positif, dibuktikan dengan hasil uji t dan tingkat signifikansinya. Hal ini mengandung arti bahwa kenaikan setiap kenaikan nilai variabel Perencanaan akan diikuti oleh naiknya nilai efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.
- c. Koordinasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung, menunjukkan hubungan yang linier positif, dibuktikan dengan hasil uji t dan tingkat signifikansinya. Hal ini mengandung arti bahwa setiap

kenaikan nilai variabel Koordinasi akan diikuti oleh naiknya nilai efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.

- d. Variabel Perencanaan dan Koordinasi secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung, dibuktikan dengan hasil uji pada Tabel *Model Summary*. Selain variabel Perencanaan dan Koordinasi diketahui terdapat variabel lain yang mempengaruhi Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung, diantaranya variabel Kepemimpinan, Pengawasan, Kompetensi Pegawai, Penempatan Pegawai dan lain-lain.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan dalam hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Dalam menyusun perencanaan hendaknya sebelum menentukan program dilakukan evaluasi dan analisis secara mendalam tentang berbagai kemungkinan atau alternatif program. Misalnya untuk program penanggulangan kemiskinan, disampaikan beberapa alternatif program diantaranya program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan atau dengan program bantuan secara langsung berbentuk modal usaha.
- b. Dalam melakukan koordinasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Dalam hal ini program-program yang telah ditetapkan harus disampaikan dan diinternalisasikan/disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, sehingga para pemangku kepentingan mengetahui program-program yang akan dilaksanakan.
- c. Agar program-program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung yang telah disusun dapat diimplementasikan dan berkesinambungan dengan program-program sebelumnya, perlu disusun program-program strategis berdasarkan tingkat prioritas, sehingga program-program yang dilaksanakan mampu mencapai sasaran secara efektif.
- d. Penggunaan Sumber Daya manusia dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Bandung, hendaknya dipilih para personil yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai, dari tingkat desa hingga tingkat nasional, sehingga program-program yang diusulkan memiliki nilai-nilai strategis dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung maupun visi dan misi secara nasional

- e. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung, mengikutsertakan para pemangku kepentingan yang selama ini belum berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan RKPD seperti misalnya Komandan Pangkalan TNI AU Sulaiman untuk mensinergikan rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang kedua instansi tersebut, dan melakukan koordinasi lebih intensif agar terjadi sinergitas program.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku

ANTHONY, Roberth N dan Vijay Govindarajan,

2009, Manajemen Control System, Jakarta, Salemba Empat

BANGUN, Wilson

2008, Intisari Manajemen, Bandung, Refika Aditama

BRANTAS,

2009, Dasar-Dasar Manajemen, Alfabeta. Bandung

FATHONI, Abdurahman,

2006 Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria, Jakarta: Akademika Presindo.

HANDAYANINGRAT, Soewarno,

2002, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, CV. Haji Masagung, Jakarta

HANDOKO, T. Hani,

2003, Manajemen. Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta, BPFE

2001, Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga

2011, Manajemen, BPFE. Yogyakarta

HASIBUAN, Malayu S.P,

2006 Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara

2009 Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara

ISKANDAR,

- 2002 Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta. Gaung Persada Press
- IVANCEVICH, John, M, dkk
- 2006 Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2 Jakarta, Erlangga
- KOONT, Et Al.
- 1984 *Management, a system and contingency Analysis of Managerial Function*, Tokyo, Mcgraw Hill Kogakusha.
- KURNIAWAN, Agung.
- 2005 Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta, PEMBARUAN
- NDRAHA, Taliziduhu,
- 2003 Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta, 1. Rineka Cipta.
- MAHMUDI
- 2005 Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- MACHFOEDZ,
- 2007 Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan, Keperawatan dan Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya
- MARTINI, dan Lubis
- 1987 Teori Organisasi. Bandung, Ghalia Indonesia
- MANULLANG, M.
- 2004 Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- MARDIASMO,
- 2009, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Andi Offset.
- MOENIR
- 2006 Prestasi Kerja, Pelaksanaan Kerja dan Pencapaian Kerja, Jakarta, Pustaka Buku
- NURSALAM,
- 2003 Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta, Salemba Medika
- PASOLONG, Harbani,
- 2007 Teori Administrasi Publik, Alfabeta. Bandung.
- RIDUWAN,
2008. Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung. Alfabeta

RIYADI DAN DEDDY  
SUPRIYADI BRATAKUSUMAH.

2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

SALAM, Dharma Setyawan.  
2004 Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jambata, Jakarta.

SIAGIAN, Sondang P

2006 Teori Motivasi Dan Aplikasinya, Jakarta, Rineke Cipta

SILALAH, Ulber,

2003 Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen, CV. Mandar Maju, Jakarta

SINGARIMBUN dan EFENDI,

1995 Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES

SISWANTO,

2005 Referensi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta.

SOEHARTONO, Irawan

1995 Metode Penelitian Sosial suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya, Bandung, Anggota Ikapi.

STEERS, Richrd. M

1985 Efektivitas Organisasi, Cetakan Kedua, Jakarta. Alih Bahasa Magdalena Jamin, Erlangga

STONER,

1996 Manajemen Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro, Jakarta, PT. Prehallindo

SUDRIAMUNAWAR, Haryono.

2002 Pengantar Studi Administrasi Pembangunan, Bandung, Mandar Maju

SUGIYONO,

2007, Metode Penelitian. Bandung : Alfabeta

SUMARSONO

2010 Manajemen Keuangan Pemerintahan, Yogyakarta, Graha Ilmu

SUMARYADI, I Nyoman

2010 Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia.

TANGKILISAN,

2005 Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pemikiran George Edwards. Yogyakarta, Lukman Offset & Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia

Scorecard Menuju. Organisasi yang Berfokus pada Strategi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

ZAHND, Markus.

2006 Perancangan Kota Secara Terpadu. Yogyakarta, Kanisius

UMAR, Husein,

2003, Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Permasalahan Dilengkapi dengan 8 bahasan Komprehensif Kasus Pemasaran. Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

ZENJU,

2008 Azas-Azas Manajemen. Bandung, Alumnii.

B. Sumber lainnya :

WALUYO

2007 Manajemen Publik Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju.

JIMIA Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Nurtanio Bandung

WINARDI,

2010 Azas-Azas Manajemen. Bandung, Alumnii.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

\_\_\_\_\_ ,

2004 Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa

YUWONO, Sony

2002 Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced

perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor

0259/M.PPN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan 2005

Tesis :

Tesis Kusdiana (2010) : Implementasi Kebijakan Bupati dan Koordinasi oleh Camat dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Tesis Rahayu (2012) : Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Parkir dan Evaluasi terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Bandung

Tesis Faisal (2012) : Pengaruh Perencanaan dan Koordinasi terhadap Efektivitas pelaksanaan program penggulungan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kecamatan Cipocok Jaya kabupaten Serang